

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Ahmad kamil & M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta. 2004.

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII)*, Disertasi Doktor, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Barda Nawawi Arief. *Mengusung Nilai-Nilai Keadilan dalam Konsep KUHP Baru*. Makalah Power point. UNNES. Semarang. 2010.

Cristopher Columbus Langdell, Harvard Celebration Speeches. Dalam *Law Quarterly Review*, 188.

Dardji, Darmodihardjo. *Pokok- Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco. 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Fahrul Ihsan, *Ekonomi Pancasila: Gagasan Dan Kemungkinan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Friedman, *Law in A Changing Society*, New York: Columbia University Press, 1972.

Fuady, M. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga. 2007.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*. Diterjemahkan oleh Alimandan, Jakarta: Prenada, 2007.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010.

Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.

Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara

J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman the Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press 2005.

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Galang Press. 2007

Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, Jakarta: Indian. Hill Co.,1997.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006,

Kaelan, 2004, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa, Paradigma*, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

Kaelan, M.S. *Filsafat Pancasila*. Perpustakaan Fak. Tarbiyah & Keguruan. 2009.

Kaelan, M.S. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi*. Paradigma, Yogyakarta, 2000

Kaelan, M. S. "*Pendidikan Pancasila*" Yogyakarta: Pen. Paradigma, 2008

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6.11, 2014.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987

Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Bandung, 2014

Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Latif, Yudi, *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung, 2015.

Latif, Yudi. *Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*, (Bandung: Mizan, 2020). hlm., 273

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Lawrence M. Friedman., dalam Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Lili Rasjidi., dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Liwe, Immanuel Christophel. *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan. Lex Crimen 3.1*. 2014.

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.

Mahkamah Agung RI, Bina Yustitia: Jakarta, 1994.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, 2019.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor Indonesia, 2004.

Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2008

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek dan Teori*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2008.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Nuqul, Fathul Lubabin & Elok Halimatus Sa'diyah. *Sikap Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Komunitas Muslim: Ditinjau dari Nilai Moral Religius dan Sikap pada Jenis Kelamin Lain (Sexism)*. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Maliki Malang. 2010.

Oemar Seno Adji, "*Peradilan Bebas Negara Hukum*", Jakarta: Erlangga, 1980.

Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: FDK UIN Raden Fatah, 2015.

Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta: Diadit Media, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Ph. Visser't Hooft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993.

R. Subekti., dalam H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafia, 2014.

Rahim, Abdul. *Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana (Studi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup)*. Diss. IAIN Curup.

Raifaldy, Jefier. *Eksepsi Atas Kewenangan Mengadili Perkara Pidana Menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP)." Lex Crimen* 8.8. 2019.

Rene David & John C. Brierly, *Major Legal System in The World Today*, Stevens & Sons: London, 1987.

Salim, H, dan Nurbani Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press. 2001

Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang, Setara Press. 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2005.

Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Steven Vago and Steven E. Barkan, *Law and Society, Eleventh edition*, New York: Routledge. 2018

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo; *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.

Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika: Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.

Teguh Prasetyo dalam *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Yudha Bhakti. Ardiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Disertasi

Ahmad Basarah, Universitas Diponegoro. *Eksistensi Pancasila sebagai tolak ukur dalam pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perpektif Filasafat Hukum dan Ketatanegaraan*. 2016.

Arfa'i, Universitas Sriwijaya. *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*. 2020

Kurnisar Universitas Sriwijaya Palembang. *Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*. 2020.

Jurnal

Art. 1 (Symbol of State): “*The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power*”. Article 2 (Dynastic Throne): “*The*

Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law Passed by The Diet”.

Constitution of The Fifth French Republic, 1958, Article 2, “*France is an indivisible, secular, democratic and Sosial Republic. It shall insure equality before the law for all citizens without distinction of origin, race, or religion. It shall respect all beliefs.*”

Eleanora, Fransiska Novita, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.1, 2012.

Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2 (2017). Hal 172-173.

Konstitusi China, Article 3 (*Democratic Centralism*): “(1) *The state organs of the People’s Republic of China apply the principle of democratic centralism. (2) The National People’s Congress and the Local people’s congresses at different levels are instituted through democratic election. They are responsible to the people and subject to their supervisor. (3) All administrative, judicial and procuratorial organs of the state are created by the people’s congress to which they are responsible and under whose supervision they operate. (4) The division of functions and powers between the central and local state organs is guided by the principle of giving full play to the initiative and enthusiasm of the local authorities*

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid-Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST”
Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid-Sus/2012, Jurnal
Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Prianter Jaya Hairi, *Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di
Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*,
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016. Jurnal Negara
Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm 90

Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum. Kementerian Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI. Kemenko Polhukam, September
2023.

Undang-Undang

Undang- Undang RI, Nomor 48 Pasal 1 Tahun 2009, Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang RI No 10 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang RI Nomor
12 Tahun 2011 *jo* Undang- Undang RI Nomor 15 tahun 2009 *jo* Undang-
Undang RI Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966,

TAP MPR No. IX/MPR/1978,

TAP MPR No. II/MPR/1978

TAP MPR No. III/MPR/2000

TAP MPR Nomor III/MPR/1973 Jo TAP MPR Nomor VI/MPR/1978
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara
dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara

TAP MPR No. XVIII/MPR/1998.

Putusan Kasus Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tertanggal 15
Desember 2021 tentang kepailitan dan PKPU.

Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel mengenai sah tidaknya
penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register perkara
155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel jo. Pengadilan Tinggi DKI Nomor :
141/PDT/2009/PT. DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2640 K/
Pdt/2009 tentang Perkara gugatan cerai WNA

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 35/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 4 Juni 2020
tentang Kepailitan dan PKPU PT. Taras Graha Advisindo (*Debitor*).

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 43/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 3 Desember 2020

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 98/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2021

Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015

Internet

<http://adzata.blogspot.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023

<https://www.bola.com/ragam/read/4422173/pengertian-pancasila-ketahui-tujuan-dan-makna-masing-masing-lambangny>. Diakses tanggal 3 feb 2023.

Peczenik, “*Kinds of Theory of legal Argumentation*”, http://www.Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm, diakses pada tanggal 3 Februari 2023

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkoplhukum-mahfud-md-beberkan-3-rencana-reformasi-hukum-pemerintah-apa-saja> diakses 11 Februari 2023

<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2015/08/Buku-Modul-Kuliah-Pancasila>. diakses pada tanggal 4 Maret 2023.

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses tanggal 8 April 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/330142/mahfud-sistem-hukum-kita-harus-diubah> diakses 8 April 2023:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6766318/mahfud-kaget-korupsi-di-ri-makin-menjadi-jadi>. "Mahfud Kaget Korupsi di RI Makin Menjadi-jadi" diakses tanggal 11 Juni 2023.